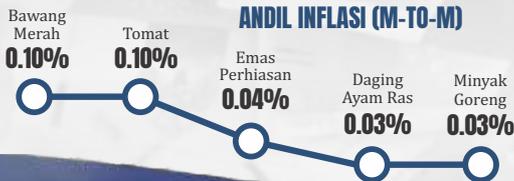


# Saling Tuding Para Wakil Rakyat Kala Penolakan PPN 12% Menguat

**P**EMERINTAH memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak. Demo di jalan, statment akademisi hingga pengamat bahkan desakan agar kebijakan itu dibatalkan juga ramai gaungnya di media sosial. Saat rakyat menyerukan protesnya, para anggota DPR RI malah saling tuding terkait inisiator kenaikan PPN tersebut. Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan usulan dari PDI Perjuangan (PDIP). Partai Banteng pun disebut 'lempar batu sembunyi tangan'. PDIP menepis dengan menegaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi dikatakan setuju untuk melakukan pembahasan. Hasilnya, sebanyak 8 fraksi di DPR RI kecuali PKS menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang dan diketok pada 7 Oktober 2021. Pemerintah diingatkan, sesuai Pasal 7 ayat (3) UU HPP tarif PPN di dalam UU HPP dapat diubah dengan persetujuan DPR. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersikap netral dengan menegaskan bila, perdebatan terkait kenaikan tarif dari 11 menjadi 12 persen tak diperlukan lagi. Sebab, rencana tersebut telah disetujui oleh semua partai di DPR RI sejak tiga tahun lalu. Kala para petinggi gaduh, rakyat bawah tetap dipajaki per Januari

Baca Hal 11....

## KOMODITAS PENYUMBANG UTAMA ANDIL INFLASI (M-TO-M)



## Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP)

- Berlandaskan UU HPP, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

- Kendati demikian, UU tersebut juga mengatur pembatalan perubahan PPN melalui Peraturan Pemerintah.

- Dalam Pasal 7 ayat (3), disebutkan bahwa tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah menjadi 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

- Prosedur pembatalan tarif PPN 12 persen telah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi: "Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis ayat tersebut.

## DUA SKENARIO PEMBATALAN PPN 12 PERSEN

### Judicial review MK

- PPN 12 persen juga bisa dibatalkan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial review bisa diajukan ke MK jika suatu aturan dinilai bertentangan dengan konstitusi.

- Langkah paling rasional yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi sebelum 2025 atau menunda penerapan PPN 12 persen.

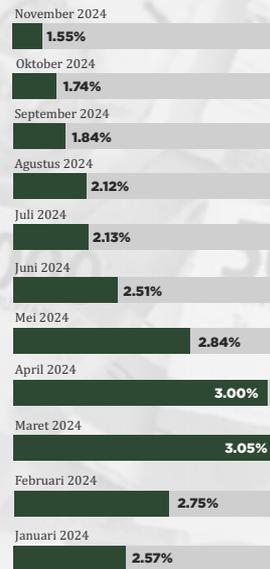
**Government  
(Hal.2)  
Erdogan Walk Out  
saat Prabowo  
Pidato  
Bela Palestina**

## TINGKAT INFLASI YEAR-ON-YEAR (YOY) NASIONAL (2024)

Tahun (Y on Y)  
**Inflasi 1.15%**

Tahun Kalender (Y to D)  
**Inflasi 1.12%**

Bulanan (m to m)  
**Inflasi 0.30%**



Sumber :  
Badan Resmi  
Statistik  
No 86/12/  
Th. XXVII.  
2 Desember  
2024

**Ogahdong<sup>®</sup>  
PAJAK PPN 12%**

obat sakit kepala untuk para bunuh diri, mahasiswa, wibu, kpopers, pejalan kaki, pekerja korporat, ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, gamers, tukang rebahan, tukang nyambat, dan seluruh aliansi masyarakat yang kena dampak pemerintah

PAJAK NAIK  
NO OGANHH  
YEEEE!

**RAKYAT  
GERAM**

# Erdogan Walk Out saat Prabowo Pidato Bela Palestina

**KAIRO**-Indonesia menerima Ketetapan D8 pada 2025. Penunjukkan Indonesia diputuskan dalam konferensi tingkat tinggi di Kairo, Mesir.

Namun, terjadi peristiwa yang menjadi buah bibir yaitu saat Presiden Turki Erdogan Tayyip terpantau keluar dari ruangan atau walk out di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8), Kairo, Mesir pada Kamis (19/12/2024).

Berdasarkan video yang ditampilkan di Youtube Sekretariat Presiden, dan dilihat pada Minggu (22/12/2024) sejumlah degelasi terpantau meninggalkan kursi mereka dan berjalan keluar di belakang Prabowo saat sedang berbicara. Salah satu delegasi yang terlihat adalah Erdogan.

Direktur Informasi dan Media Kemenlu Hartyo Harkomoyo mengaku belum dapat mengkonfirmasi video tersebut. Namun, menurut dia, masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan kapan ketua delegasi duduk atau meninggalkan ruangan dalam suatu sidang internasional.

Ia menambahkan, sesuatu hal yang lumrah bila para ketua delegasi itu melakukan banyak pertemuan paralel saat pertemuan internasional. Antara lain untuk lakukan pertemuan bilateral dengan ketua delegasi lain di ruangan lain.

"Jadi sifat keluar masuk ruangan meeting adalah hal yang lumrah untuk meeting internasional (termasuk di forum PBB). Delegasi Indonesia tidak dapat memberikan komentar terhadap jadwal ketua delegasi negara lain yang mungkin tidak dapat hadir sepenuhnya pada saat Bapak Presiden Indonesia memberikan statement-nya," urai dia.

Hartyo pun memastikan hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Erdogan Tayyip dalam kondisi baik.

"Presiden RI melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Erdogan Tayyip dalam suasana persahabatan," ujar Hartyo, Minggu (22/12/2024).

Dalam KTT tersebut, Prabowo menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara muslim. Ia menyoroti lemahnya solidaritas antarnegara Muslim pada sejumlah isu, seperti perdamaian dan kemanusiaan.

"Kami harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" kata Prabowo dikutip dari laman Sekretariat Presiden).



Presiden Turki Erdogan Tayyip terpantau keluar dari ruangan atau walk out di tengah pidato Presiden Prabowo Subianto saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8), Kairo, Mesir pada Kamis (19/12/2024). (Tangkapan layar YT Setpres)

Prabowo mengatakan bahwa sejumlah negara dalam beberapa pertemuan mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

"Ketika saudara kita kesusahan, kita memberikan pernyataan dukungan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan. Maaf ini opini saya, tapi mari kita lihat realitasnya. Kita harus bekerjasama, menyamakan suara, dan tidak terpecah belah," katanya.

Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim. Ia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

"Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita," katanya.

Ia juga menilai bahwa dunia internasional tidak menghormati suara negara-negara Muslim. Bahkan, menurutnya isu hak asasi manusia sering kali tidak berlaku bagi umat Muslim.

"Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri," ujarnya.

## Pengamat: Terlalu Menggurui

Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT Developing Eight (D-8) yang menyerukan persatuan negara-negara Islam memang bagus. Namun, Prabowo terkesan mengurui dan abai terhadap apa yang telah dilakukan negara-negara tersebut.

"Hanya saja terkesan Prabowo mengurui dan abai bahwa

sesungguhnya seluruh negara Islam, khususnya negara-negara Timur Tengah, termasuk Turki, Iran, dan Mesir, sudah cukup keras mengecam Israel," kata Smith, Minggu (22/12/2024).

Bahkan, Turki menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel dan ikut bergabung dengan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ).

"Sementara apa yang dilakukan RI dipandang belum seberapa ketimbang apa yang sudah dilakukan negara-negara D-8, khususnya Turki, Iran, dan Mesir. Jadi, bisa dipahami bila ada pemimpin yang tersinggung, lalu walkout," paparnya.

Smith menambahkan Iran sendiri dua kali melancarkan serangan besar ke Israel. Sementara Mesir terus berusaha meloloskan gencatan senjata Hamas-Israel.

"Prabowo sendiri (kalau saya tidak salah) tidak mengecam Israel dan hanya menyerukan persatuan negara-negara Islam," lanjutnya

Menurutnya, Prabowo tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan di Gaza dan apa yang telah dilakukan negara-negara di kawasan.

Mereka umumnya mengalami gejolak politik dalam negeri akibat tidak berdaya menekan Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara Uni Eropa untuk segera mengakhiri genosida serta ethnic cleansing yang dilakukan Israel terhadap Palestina.

Dia tak memungkiri bahwa Indonesia begitu vokal membela dan mendukung Palestina di forum-forum internasional tetapi tidak berarti menampik tindakan yang telah dilakukan negara-negara Islam.

"Benar RI sudah cukup membela Palestina di forum-forum internasional, tapi tidak berarti yang dilakukan negara-negara Islam lain lebih kecil kontribusinya jika dibandingkan dengan RI. Jadi, tidak pada tempatnya Prabowo seolah menyalahkan

## APA ITU D-8?

- Kelompok negara berkembang D-8 merupakan organisasi kerja sama ekonomi antara negara-negara berkembang dengan penduduk mayoritas Muslim yakni Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
- Pembentukan Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 secara resmi diumumkan melalui Deklarasi Istanbul pada KTT Kepala Negara/Pemerintahan pada tanggal 15 Juni 1997.
- Tujuan D-8 adalah meningkatkan posisi negara-negara anggota dalam ekonomi global, mendiversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan meningkatkan standar hidup.
- Kelompok tersebut membayangkan kerja sama antarnegara yang membentang dari Asia Tenggara hingga Afrika. Perwakilan dari Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, dan Pakistan menghadiri Seminar tersebut. Konferensi ini merupakan langkah awal menuju pembentukan D-8 dan baru setelah serangkaian pertemuan persiapan, Organisasi Kerja Sama Ekonomi D-8 resmi dibentuk dan memulai kegiatannya dengan Deklarasi Istanbul pada 15 Juni 1997.
- Seperti yang dinyatakan oleh D-8 Facts and Figure Publication: "Tujuan D-8 adalah untuk memperbaiki posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, melakukan diversifikasi dan menciptakan peluang baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan tingkat internasional, dan memberikan standar hidup yang lebih baik. Bidang kerja sama utama meliputi keuangan, perbankan, pembangunan pedesaan, sains dan teknologi, pengembangan kemanusiaan, pertanian, energi, lingkungan, dan kesehatan.

negara D-8, khususnya Turki, Iran, dan Mesir, yang dianggap belum cukup berbuat untuk Palestina, termasuk dalam bantuan kemanusiaan," tegasnya.

Dia juga menyoroti kritikan Prabowo tentang ketiadaan solidaritas, kerja sama dan keter-pecahan suara di antara sesama negara muslim.

"Harus diakui, ada agenda dan kebijakan yang agak berbeda di antara sesama negara muslim terkait cara menghadapi Israel, tapi mereka satu suara dalam mendukung Palestina," ujarnya.

"Prabowo tidak cukup peka ketika ia mengatakan kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?" Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antarnegara Muslim," tambahnya.

Smith mengungkapkan dalam pidatonya, Prabowo menyebut konflik internal di beberapa negara muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama. Kritik ini sepertinya mengarah pada Turki dan Iran yang berseberangan terkait Suriah. (wid,rls,ist,med/dya)

# DPR Beri Sinyal Tak Setujui KPU-Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc

BALI- Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diwacanakan diubah menjadi badan ad hoc (sementara). Pasalnya, tugas KPU dan Bawaslu dinilai hanya signifikan saat pelaksanaan pemilu dilakukan.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan tidak sepakat dan tetap ingin penyelenggara pemilu tetap menjadi lembaga permanen. Dia juga mengatakan, pembahasannya belum bergulir di parlemen.

"Pembahasannya 'kan belum dilakukan terkait dengan revisi sejumlah undang-undang. Ya kita tunggu saja nanti. Partai-partai politik juga belum menyampaikan sikap resminya kepada kami. Tapi, kalau ditanya secara pribadi, saya kira lebih baik kita pertahankan yang ada sekarang," ujarnya di Badung, Bali, Minggu (22/12/2024).

Rifqi mengapresiasi keberhasilan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pemilihan kepala daerah secara beruntun di tahun yang sama.

Menurut dia, terdapat hal yang lebih substantif daripada mengkhawatirkan ada atau tidaknya tugas KPU dan Bawaslu setelah tahapan pemilu. Salah satunya, yaitu menata sistem kepemiluan dengan mempertimbangkan perubahan jadwal pemilihan.

"Saya kira, kita juga perlu untuk merenungkan apakah jadwal pileg, pilpres, dan pilkada di satu tahun yang sama dengan konsekuensi adanya tumpang tindih tahapan di beberapa tempat, itu apa perlu kita evaluasi atau tidak? Kalau itu perlu kita evaluasi, maka akan ada kemungkinan jadwal pilkada itu tidak di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres," katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut, pihaknya mendapat masukan agar ada dua jenis pemilu, yakni pemilu nasional dan lokal. Pemilu nasional meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR RI dan DPD, sedangkan pemilu lokal meliputi pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah.

"Hal-hal seperti ini akan kita kaji, timing-nya (waktu) seperti apa sehingga menurut saya, dalam konteks ini, mengutak atik ad hoc atau tidaknya KPU menjadi belum terlalu relevan karena ada hal yang jauh lebih



(Ilustrasi) Mural tentang ajakan menolak politik uang dan mengawasi pemilu yang adil menghiasi pagar tembok warga. (dok. Ist)

substantif yang harus kita bicarakan untuk kita menata sistem politik dan pemilihan kita ke depan," imbuh Rifqinizamy.

Wacana untuk mengubah kelembagaan penyelenggara pemilu menjadi lembaga ad hoc bergulir di lingkungan DPR RI akhir bulan Oktober lalu. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengusulkan KPU diubah menjadi lembaga ad hoc dengan masa

kerja dua tahun untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu.

"Jadi kami sedang berpikir di DPR, justru KPU itu hanya lembaga ad hoc, dua tahun saja. Ngapain kita menghabiskan uang negara kebanyakan?" kata Saleh saat rapat dengar pendapat antara Baleg DPR RI bersama tiga lembaga/organisasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Menanggapi usulan tersebut, pakar ilmu politik

Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Luthfi Makhasin, menilai KPU tetap dibutuhkan sebagai lembaga permanen atau bukan ad hoc.

"Selain sebagai lembaga teknis penyelenggaraan pemilu, KPU penting untuk mengawal pelembagaan dan penguatan demokrasi. Fungsi itu tidak bisa berjalan optimal kalau statusnya ad hoc," ujar Luthfi.

Menurut dia, jika KPU menjadi lembaga ad hoc, maka rawan terjadi intervensi dari birokrasi dan kekuatan politik di luar lembaga yang berpotensi melemahkan kelembagaan.

"Hal yang diperlukan saat ini justru memperkuat kelembagaan KPU agar lebih mandiri dan benar-benar independen, serta bebas dari campur tangan partai politik atau kekuatan lain," kata dia.

Karena itu, dia menilai wacana KPU menjadi lembaga ad hoc dengan alasan penghematan anggaran mengada-ada dan tidak memiliki pijakan yang kuat. (ant, din, wid, rls/dya)

## MK Terima 312 Permohonan Sengketa, Pilkada 2024 Bermasalah?

**PERKUMPULAN** untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat terdapat 312 permohonan sengketa pemilihan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK)..

Dia menuturkan jumlah tersebut merupakan rekapitulasi yang diambil dari situs resmi MK per Jumat (20/12) pukul 16.00 WIB.

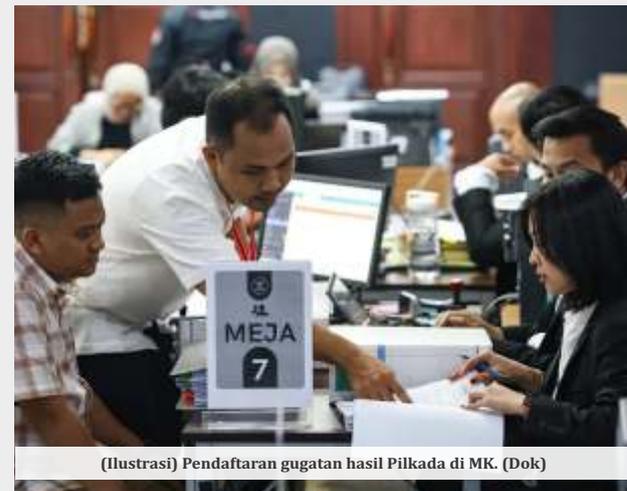
"Dari data itu ditemukan bahwa ada 312 permohonan, yang itu berasal dari pemilu bupati, wali kota, dan gubernur," kata Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki saat menyampaikan paparan dalam diskusi daring bertajuk "Potret Awal PHP-Kada 2024" dipantau di Jakarta, Minggu (22/12/2024).

Dia lantas merinci bahwa dari jumlah tersebut permohonan terbanyak berasal dari sengketa pemilihan bupati, dengan permohonan berjumlah 241 perkara atau 77,2 persen dari total permohonan.

Permohonan terbanyak selanjutnya berasal dari sengketa pemilihan wali kota sebesar 49 perkara (15,7 persen). Lalu, permohonan yang paling sedikit adalah sengketa pemilihan gubernur sebesar 22 perkara (7,1 persen).

"Ini jumlah yang cukup banyak ya sebenarnya," ucapnya.

Dia menyebut banyaknya permohonan sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke MK menunjukkan tingginya perhatian dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHPKADA) menjadi tahapan yang cukup penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam



(Ilustrasi) Pendaftaran gugatan hasil Pilkada di MK. (Dok)

pilkada.

"Namun tingginya perkara ini juga bisa diartikan ada permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, baik dari sisi pelaksanaan, administrasi, maupun pengawasan, yang kemudian berpengaruh pada persepsi publik terhadap keadilan hasil pilkada," kata dia. (ant, din/dya)

## Kemenkes Ungkap Terima 543 Laporan Perundungan PPDS Selama 1,5 Tahun

**JAKARTA**-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan sudah menerima total 543 laporan bullying atau perundungan yang terjadi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menyebut bahwa angka tersebut merupakan data yang masuk di kanal pengaduan yang disediakan oleh Kemenkes.

Data kasus perundungan itu terhitung sejak Instruksi Menkes No. HK.02.01/Menkes/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes diberlakukan pada 20 Juli 2023 hingga per 16 Desember 2024.

"Untuk pelaporan perundungan per 16 Desember 2024, ada 543 laporan perundungan," ujar Aji saat dikonfirmasi, Minggu (22/12).

Dari data tersebut, total 318 kasus perundungan yang dilaporkan terjadi di Rumah Sakit Vertikal (RSV) Kemenkes.

"318 [kasus] ada di RS Vertikal Kemenkes, sisanya 225 terjadi di luar RSV (RSUD, RS Universitas, atau FK univ)," bebarnya.

Aji menyebut, bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk memberantas praktik perundungan yang terjadi selama PPDS.

"Kemenkes tetap berkomitmen untuk memberantas praktik perundungan yang terjadi selama masa pendidikan tenaga kesehatan atau tenaga medis," katanya.

"Komitmen ini tertuang dalam Instruksi Menteri Kesehatan No. HK.02.01/Menkes/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kemenkes," ucap dia.

Belakangan, kasus perundungan

memang kerap mencoreng sistem pendidikan dokter spesialis di Indonesia. Salah satu yang mengundang perhatian publik, yakni meninggalnya mahasiswi PPDS FK Universitas Diponegoro dr Aulia Risma Lestari.

Sebelumnya KPK mengungkapkan adanya sejumlah permasalahan terkait pembiayaan hingga praktik bullying dan senioritas di PPDS.

Bahkan, muncul temuan adanya biaya tambahan hingga lebih dari Rp 25 juta terkait perilaku senioritas tersebut.

"Perilaku favoritisme, senioritas, dan diskriminasi memberi dampak sistemik dalam memunculkan biaya tambahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya mulai dari Rp 1 juta hingga lebih dari Rp 25 juta," demikian dikutip dalam laporan kajian KPK tersebut.

Kasus tersebut bermula pada

Senin, 12 Agustus 2024 lalu, saat dr Aulia Risma Lestari ditemukan meninggal di kamar kosnya.

Diduga Aulia bunuh diri karena tidak kuat di-bully para seniornya. Ia pun—dengan teman-teman seangkatannya—diperas oleh senior.

Pada 7 Oktober 2024, Polda Jateng pun sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan.

Akan tetapi, hingga saat ini, Minggu (22/12/2024), belum ada satu pun orang yang dikenakan status tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagio, menjelaskan status kasus ini. Subagio menegaskan tak ada kendala dalam penanganan kasus ini.

"Belum ada tersangka. Tidak ada [kendala], karena butuh kehati-hatian dalam penanganannya," ucap Subagio kepada wartawan, Kamis (19/12/2024) lalu. (wid,rla,ant/dya

## UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu Berkolaborasi dengan EJSC Luncurkan Program Circle Hub SIPARIMANTA 2.0

**SURABAYA**-Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan (UPT) Pantai Bulu menyelenggarakan fungsi di bidang pelayanan teknis pelabuhan perikanan pantai, tata kelola dan pelayanan usaha, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat. Guna mempercepat transformasi digital serta mewujudkan budaya kerja PROAKTIF (Profesional, Akuntabel, Transparan, Integritas dan Inovatif) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu - Tuban meluncurkan berbagai inovasi berbasis digital. Salah satunya adalah SIPARIMANTA (Sistem Informasi Permohonan Magang dan Permintaan Data).

Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu resmi meluncurkan Program Circle Hub. Inisiatif ini bertujuan untuk memfasilitasi para alumni peserta magang dan praktik kerja lapangan agar terus mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan bakat mereka.

Program ini merupakan upaya PPP Bulu bekerjasama dengan East Java Super Corridor (EJSC) Jawa Timur yang memiliki wilayah kerja sesuai dengan lokasi asal peserta magang atau tinggal sementara. Salah satunya kali ini menjadi awal melakukan kolaborasi dengan Bakorwil III Malang yang membawahi wilayah kerja meliputi



Kabupaten Malang; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Blitar; Kota Blitar; Kota Malang; Kota Batu; Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.

Pada tanggal 15 November 2024 sebagai langkah awal, Program Circle Hub akan bekerja sama dengan East Java Super Corridor (EJSC) untuk memberikan wadah atau pengembangan diri bagi khususnya Alumni Magang dan PKL dari UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu yang berada di wilayah kerja tersebut. Selain melakukan koordinasi Tim SIPARIMANTA juga berupaya memberikan feedback dengan memperkenalkan fasilitas EJSC yang bisa dimanfaatkan dalam menunjang kompetensi dan pendidikan.

Diantaranya, Coworking Space, Meeting Room, Command Center, Class Room dan Cafe. EJSC Malang ini terletak di dalam kompleks Bakorwil III Malang dengan alamat Jl. Simpang Ijen No 2, Malang dengan waktu buka Senin - Jumat Pukul 08.00-16.00 WIB.

Dari hasil koordinasi dan kerja sama memberikan hasil positif diberikan kesempatan untuk memberikan ruang pengembangan kompetensi bagi alumni SIPARIMANTA untuk bergabung pada workshop yang akan diselenggarakan secara offline di Ruang Kelas EJSC. Masyarakat memiliki kesempatan emas untuk mengembangkan karier di bidang kelautan dan perikanan maupun teknologi sesuai dengan



jurusan alumni dan peserta magang.

UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu bekerja sama dengan EJSC (East Java Super Corridor) Bojonegoro membuka program workshop khusus bagi alumni SIPARIMANTA.

Program magang ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta untuk mengasah keterampilan, memperluas jaringan, dan menemukan passion di dunia kelautan. Program ini diberikan nama Circle Hub SIPARIMANTA 2.0 Dengan mengikuti program ini, alumni SIPARIMANTA diharapkan dapat menjadi generasi penerus yang mampu memajukan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. (Adv)

# Polri Prediksi Pemudik Nataru Naik 3 Juta, Menjadi 110 Juta Orang

**JAKARTA**-Polri melaporkan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) hari pertama mudik Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) atau hari pertama Operasi Lilin pada Sabtu (21/12/2024). Diketahui, terjadi peningkatan volume kendaraan dibanding hari biasa.

"Data ini menunjukkan tren peningkatan arus mudik menjelang Natal. Kami terus memantau dan melakukan langkah-langkah pengaturan agar masyarakat dapat berkendara dengan nyaman," kata Juru Bicara Operasi Lilin 2024 Kombes Syamsu Ridwan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/12/2024).

Peningkatan volume kendaraan itu terlihat di Pelabuhan Merak-Ciwandan Bakauheni. Syamsu menyebut peningkatan volume kendaraan terjadi baik keluar dan masuk wilayah Jakarta.

Sebelumnya, Polri memprediksi



Moda transportasi kapal laut masih menjadi primadona warga untuk melakukan perjalanan, salah satunya momen libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 di Samarinda, Kaltim. (Ant)

110 juta orang akan melakukan mudik pada masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 alias Nataru. Jumlah ini mengalami peningkatan sekitar 2,8 persen atau 3 juta orang dibanding musim libur Nataru tahun lalu.

"Potensi pergerakan masyarakat diperkirakan mencapai 110,67 juta orang. Meningkat sebesar 2,83 persen

atau 3,04 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Jaya 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2025).

Untuk itu, Karyoto menyebut, Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama

dengan Ditjen Perhubungan Darat dan Ditjen Bina Marga untuk menyusun sejumlah aturan yang akan diterapkan guna menjaga kelancaran lalu lintas.

"Telah menerbitkan surat keputusan bersama yang mengatur tentang pembatasan operasional angkutan barang, penerapan rekayasa lalu lintas. Penyeberangan laut: delaying system dan buffer zone. Pemberhentian sementara pekerjaan proyek konstruksi dan penutupan, serta pengalihfungsian sementara lokasi penimbangan kendaraan," paparnya.

Karyoto berpesan kepada jajarannya yang bertugas agar bisa berlaku proaktif dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait rekayasa lalu lintas yang diterapkan.

"Pastikan masyarakat dapat mengetahui informasi terkait layanan kepolisian, pesan-pesan kamtibmas, dan penerapan pengaturan rekayasa arus lalu lintas. Sehingga seluruhnya dapat terlayani dengan baik," ungkapnya. (wid, rls/dya)

# Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap di Kabupaten Gresik Tingkatkan Kepatuhan dan Produktivitas Nelayan



**GRESIK** - Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pemahaman nelayan terhadap pentingnya legalitas usaha perikanan tangkap, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Pembinaan Izin Usaha Perikanan Tangkap. Acara ini dilaksanakan di Desa Gumeng, Kabupaten Gresik, dan dihadiri oleh puluhan nelayan setempat.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada para nelayan, khususnya yang menggunakan kapal berukuran < 5 Gross Ton (GT), agar memahami pentingnya mematuhi regulasi perikanan. Selain itu, pembinaan ini juga menjadi ajang untuk mendorong optimalisasi potensi perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Gresik



yang dikenal memiliki kekayaan sumber daya laut.

Ada beberapa materi utama yang menjadi fokus pembinaan ini, yaitu Potensi Perikanan Tangkap di Kabupaten Gresik, Regulasi dan Mekanisme Penerbitan Dokumen Kapal Penangkap Ikan, dan Mekanisme Perizinan Kapal Perikanan Berukuran di Bawah 5 GT.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari para nelayan. Salah satu peserta, Ahmad Basri selaku ketua rukun nelayan Desa Gumeng menyampaikan apresiasinya terhadap pembinaan ini. "Terimakasih karena sudah mengadakan acara pembinaan perikanan tangkap ini,

yang tentunya sangat bermanfaat bagi kami khususnya nelayan gumeng karena dengan pembinaan ini, kami jadi paham langkah-langkahnya dan lebih percaya diri untuk mengurus izin sendiri," ujarnya.

Kabupaten Gresik sendiri memiliki potensi besar di sektor perikanan tangkap. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa wilayah ini

menyumbang produksi ikan tangkap yang signifikan di Jawa Timur. Oleh karena itu, pembinaan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam memaksimalkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.

Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Dengan memastikan legalitas usaha, nelayan tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. dengan langkah ini, diharapkan sektor perikanan tangkap di Kabupaten Gresik dapat terus berkembang, memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. (ADV)



# Pemkab Malang Tarik Investor Tiongkok Kembangkan Ampas Tebu Jadi Tisu

**MALANG-** Manfaatkan limbah ampas tebu menjadi produk tisu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang



Ini merupakan langkah penting dalam memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, khususnya ampas tebu yang selama ini hanya terbuang. Dengan mengolahnya menjadi tisu, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru,"

**Sanusi**  
Bupati Malang

berencana bekerja sama dengan investor asal Republik Rakyat Tiongkok. Bupati Malang, Sanusi, mengatakan rencana pendirian pabrik tisu ini merupakan upaya Pemkab dalam mengelola limbah ampas tebu yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sanusi berharap, hal ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

"Ini merupakan langkah penting dalam memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, khususnya ampas tebu yang selama ini hanya terbuang. Dengan mengolahnya menjadi tisu, kita tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru," ujar Sanusi, Minggu (22/12/2024).

Tebu sendiri, lanjut Sanusi, merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Malang. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkab Malang, lahan tebu di wilayah ini mencakup sekitar 44 ribu hektare, yang merupakan bagian dari total lahan pertanian seluas 161 ribu hektare.

"Dengan luas lahan tersebut, produksi tebu di Kabupaten Malang dapat mencapai 4 juta ton per tahun,"

ujarnya.

Sanusi menjelaskan, dengan adanya kerjasama tersebut, nantinya setelah diproses menjadi gula, batang tebu yang masih memiliki potensi nilai ekonomi akan diolah menjadi produk lain, seperti tisu.

"Ya, ini bagian dari upaya kami untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Dengan ini, kami berharap bisa menambah pendapatan petani tebu serta membuka peluang usaha baru di sektor industri," tambahnya.

Terkait nilai investasi, Sanusi mengungkapkan perusahaan asal Tiongkok tersebut akan menanamkan modalnya sekitar Rp 1,5 triliun untuk pembangunan pabrik tisu tersebut. "Investasi yang akan masuk sekitar Rp 1,5 triliun. Ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah," katanya.

Lokasi pabrik tisu tersebut direncanakan akan dibangun di kawasan industri yang terletak di Kecamatan Jabung, Kabupaten



Salah satu pertanian tebu di Kabupaten Malang. (dok. ist)

Malang. Sanusi menegaskan, Jabung dipilih karena memiliki infrastruktur yang memadai dan dekat dengan sumber bahan baku.

Pemkab Malang menargetkan agar pabrik tisu ini dapat mulai beroperasi pada tahun 2026 mendatang. "Ya lagi peninjauan, lagi perundingan (dengan investor dari Tiongkok). Harapannya nanti tahun 2026 (teralisasi pendirian pabrik tisu). Supaya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta membuka lapangan pekerjaan baru," tutupnya. (Santi/Dya)

## Cegah Kanker Serviks Sejak Dini Pemkot Malang Targetkan 6.500 Siswa Divaksinasi HPV



Pelaksanaan vaksinasi HPV untuk remaja perempuan di Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

Suwarjana, menyebutkan program ini akan mencakup peserta dari SMP, madrasah, dan pondok pesantren, dengan vaksinasi dilakukan dalam tiga dosis.

"Targetnya itu insyaallah 6.500, itu sesuai data kami. Karena kalau di SMP itu kisaran 4.000 sekian sampai 5.000. Nanti ditambah lagi yang dari madrasah dan pondok pesantren. Pekan ini kita kejar ada 1.009 anak perempuan usia 15 tahun," ujar Suwarjana, Minggu (22/12/2024).

Suwarjana juga berharap orang tua dapat memberikan izin kepada putri mereka untuk mengikuti program vaksinasi ini. Menurutnya, meskipun awalnya banyak orang tua yang menolak, pemahaman mengenai manfaat vaksinasi HPV semakin meningkat seiring dengan sosialisasi yang

dilakukan pihak sekolah dan dinas terkait.

"Kami harap orang tua sadar dan mengizinkan putrinya untuk divaksin. Karena ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi putrinya," imbuhnya. Ia juga menambahkan, beberapa orang tua sempat menolak vaksinasi tersebut, namun setelah diberikan penjelasan, mereka akhirnya bersedia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Husnul Muarif, menekankan pentingnya vaksinasi HPV sebagai langkah pencegahan yang signifikan terhadap kanker serviks. Menurutnya, angka kejadian kanker serviks di Kota Malang cukup tinggi, dan vaksinasi ini merupakan upaya preventif yang perlu didorong.

Husnul juga mengungkapkan, deteksi dini kanker serviks di Kota Malang menggunakan teknik Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) menunjukkan angka yang cukup mencemaskan. Dari 290 wanita yang melakukan skrining IVA, sekitar 18 persen terdeteksi mengidap kanker

serviks, meski sebagian besar masih berada pada tahap awal (grade 1), yang dapat ditindaklanjuti dengan pengobatan lebih lanjut di puskesmas.

Oleh karena itu, Husnul menegaskan vaksinasi HPV sangat diperlukan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap infeksi virus HPV yang dapat mengarah pada kanker serviks. Menurutnya, pemberian vaksinasi ini juga diperuntukan pada anak perempuan mulai dari usia 11 tahun sebagai upaya memberikan perlindungan maksimal sejak dini.

"Di usia 11, 12, dan 15 tahun itu kita perlu menyiapkan kekebalan, terutama terhadap infeksi HPV. Ini langkah pencegahan yang sangat penting," lanjutnya.

Mengenai capaian vaksinasi HPV, Husnul juga mengaku optimistis dapat mencapai angka 95 persen. "Insyaallah kita bisa menurunkan angka kejadian kanker serviks sampai 95 persen, dengan vaksinasi ini yang terdiri dari tiga dosis," tutup Husnul. (Santi/Dya)

**MALANG-** Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan vaksinasi Human papillomavirus (HPV) untuk 6.500 siswa perempuan usia 15 tahun. Ini sebagai upaya pencegahan kanker serviks sejak dini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang,



# CINTA LAURA TAMPIL BERBAHASA JAWA DI 'PANGGONAN WINGIT 2: MISS K'

**CINTA LAURA** kembali mencuri perhatian publik lewat aksinya dalam film horor terbaru PANGGONAN WINGIT 2: MISS K. Aktris multitalenta ini menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dengan tampil fasih berbahasa Jawa. Penampilannya yang memukau ini tidak hanya membuktikan profesionalismenya sebagai seorang artis dan menjadi daya tarik utama yang menambah nuansa autentik dalam cerita film tersebut.

Film PANGGONAN WINGIT 2: MISS K merupakan kelanjutan dari kisah horor yang sukses pada seri sebelumnya. Kali ini, cerita berpusat pada misteri yang terjadi di sebuah lokasi angker di Jawa, di mana Cinta memerankan tokoh utama sebagai Alma yang harus menghadapi konflik batin dan ketegangan supernatural. Kemampuan bahasa Jawa yang ditampilkan oleh Cinta memberikan warna tersendiri dalam pengembangan karakter dan membangun suasana lokal yang kuat.

## 1. Ragam Dialek Bahasa Jawa

Cinta Laura mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan terlibat dalam film PANGGONAN WINGIT 2: MISS K, yang memberikan pengalaman unik dalam mempelajari bahasa Jawa. Ia mengaku baru menyadari keragaman dialek bahasa Jawa setelah mendalami perannya di film ini.

"Aku bersyukur dengan project ini,

karena dari project ini aku baru benar-benar tahu bahwa bahasa Jawa itu sangat beragam. Orang yang berbahasa Jawa di Jawa Tengah memiliki dialek yang berbeda dengan Jawa Timur," ujar Cinta saat ditemui dalam penayangan perdana film tersebut di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024) lalu.

Bagi Cinta, pengalaman ini tidak hanya memperkaya pengetahuannya tentang budaya lokal, tetapi juga menjadi tantangan baru yang menambah nilai dalam karier aktingnya. Penampilannya yang fasih berbahasa Jawa menjadi sorotan dan menambah nuansa autentik dalam film bergenre horor ini.

## 2. Datangkan Pelatih

Cinta Laura mengungkapkan bahwa tim produksi PANGGONAN WINGIT 2: MISS K memberikan perhatian besar pada keaslian dialog dalam film. Salah satu langkah yang diambil adalah menghadirkan pelatih khusus untuk membimbing para pemain, termasuk dirinya, agar mampu menguasai bahasa Jawa dengan baik.

"Di film ini, kita didatangkan coach (pelatih) bahasa Jawa yang kata-katanya dikurasi agar kata yang diucapkan memang bahasa Jawa yang dari Jawa Timur," ucap Cinta Laura.

Menurut Cinta, pelatihan ini sangat membantu dirinya mendalami peran dan memberikan penampilan yang

lebih autentik. Usaha ini sekaligus menunjukkan komitmen tim produksi dalam menghadirkan film yang tidak hanya menarik secara cerita, tetapi juga akurat secara budaya. Penonton diharapkan bisa merasakan nuansa lokal yang kental melalui dialog dan penggambaran latar dalam film ini.

## 3. Belajar Bahasa Jawa

Cinta Laura berbagi pengalaman menariknya dalam mempelajari bahasa Jawa selama proses produksi film PANGGONAN WINGIT 2: MISS K. Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak memulai dari nol dalam mempelajari bahasa tersebut, melainkan menyesuaikan dialog yang sudah disiapkan agar sesuai dengan dialek Jawa Timur.

"Aku belajar bahasa Jawanya nggak dari nol ya, bukan kayak orang belajar bahasa baru, tapi dengan dialog yang sudah ada kita adjust dengan bahasa Jawa Timur. Dari situ aku mempelajari kata per kata bagaimana meng-ucapkannya dengan baik dan benar," sambungnya.

Pendekatan ini tidak hanya membantunya memahami bahasa, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mendalami karakter yang diperankannya. Proses tersebut menjadi bagian penting dalam menciptakan penampilan yang autentik dan mampu merepresentasikan budaya lokal dengan lebih

kuat di film tersebut.

Cinta Laura berhasil menunjukkan dedikasi dan bakatnya dengan tampil fasih berbahasa Jawa dalam film terbarunya, PANGGONAN WINGIT 2: MISS K. (nei,ist/dya)



# Manfaat Ikan Pollock Bisa Atasi Pikun

**IKAN** pollock mungkin belum begitu populer di Indonesia, tetapi jenis ikan laut ini memiliki banyak nutrisi bermanfaat. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu mencegah masalah daya ingat. Ikan pollock tergolong jarang dikonsumsi, bahkan mungkin masih asing di telinga masyarakat Indonesia. Padahal, ikan ini memiliki banyak sekali nutrisi yang baik untuk kesehatan, bahkan salah satu manfaatnya adalah mencegah pikun.

Ikan pollock merupakan jenis ikan laut yang banyak ditemukan di perairan Atlantik dan Alaska. Meski begitu, kamu tetap bisa menemukan ikan ini di Indonesia kok, karena ikan pollock saat ini sudah banyak tersedia di e-commerce atau swalayan barang-barang impor.

Ikan pollock dapat dikenali dengan ciri fisik tubuh yang langsing dan memanjang, serta punggungnya yang memiliki warna hitam agak kehijauan. Selain itu, ikan ini juga memiliki kadar merkuri yang rendah sehingga aman untuk dikonsumsi, bahkan oleh ibu hamil. Kandungan Nutrisi dalam Ikan Pollock

Ikan pollock dikenal baik dikonsumsi oleh kamu yang sedang menjalani program diet. Bagaimana tidak, dalam 100 gram ikan pollock saja hanya terdapat 92 kalori dan rendah lemak jenuh.

Berbagai Manfaat Ikan Pollock Bagi Kesehatan

Nah, karena memiliki banyak

kandungan nutrisi yang baik, tidak heran bila ikan pollock memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Berikut ini adalah beberapa manfaat ikan pollock yang sayang bila kamu lewatkan:

## 1. Mengatasi dan mencegah pikun

Apakah kamu sering lupa di mana menaruh kunci, remot, atau hp? Jika iya, kondisi ini kemungkinan terjadi karena kamu kekurangan vitamin B, nih. Hal ini karena vitamin ini memiliki peran penting dalam menjaga otak agar tetap sehat dan berfungsi normal. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mencegah terjadinya pikun, kamu perlu memenuhi kebutuhan vitamin B harian.

Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi makanan kaya akan vitamin B, seperti ikan pollock.

Selain itu, manfaat ikan pollock satu ini juga diperoleh berkat kandungan protein di dalamnya yang cukup tinggi, yang dapat menurunkan risiko penurunan daya ingat karena penuaan.

## 2. Memelihara kesehatan rambut

Ingin punya rambut yang sehat dan tebal? Coba rutin konsumsi ikan pollock, deh. Soalnya, berbagai kandungan vitamin B dalam ikan pollock mampu memperkuat rambut

sehingga mencegah kerontokan. Selain itu, kandungan vitamin B, vitamin D, zinc, dan zat besi dalam ikan pollock juga dapat merangsang pertumbuhan rambut yang sehat.

## 3. Menurunkan berat badan

Seperti yang sudah dijelaskan, ikan pollock rendah kalori dan lemak sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan makanan bagi kamu yang sedang menjalani program diet untuk menurunkan berat badan.

Selain itu, protein di dalamnya dapat meningkatkan produksi hormon yang membuatmu merasa kenyang lebih lama. Dengan begitu, asupan kalori harian akan berkurang dan berat badan pun dapat menurun.

## 4. Mengurangi risiko terkena penyakit jantung

Mengonsumsi ikan pollock secara rutin juga dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung, lho. Ini karena kandungan asam lemak omega-3 dalam ikan pollock mampu mengurangi kadar trigliserida dalam darah, yang merupakan faktor risiko terjadinya penyakit jantung.

Selain karena kandungan omega-3 di dalamnya, manfaat ikan pollock satu ini juga didapatkan berkat kandungan kalium di dalamnya yang

dapat menjaga tekanan darah tetap stabil dan detak jantung tetap teratur.

5. Meningkatkan kesuburan

Rutin mengonsumsi ikan pollock juga dipercaya dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan momongan, lho. Soalnya, kandungan omega-3 dalam ikan pollock diketahui mampu meningkatkan aliran darah ke ovarium dan produksi follicle stimulating hormone (FSH), sehingga pematangan sel telur pun menjadi lebih optimal.

Tak hanya itu, kandungan folat, vitamin D, zinc, dan omega-3 dalam ikan pollock juga dapat meningkatkan jumlah dan pergerakan sperma, serta meningkatkan kadar hormon testosteron yang berperan dalam produksi sperma. Dengan begitu, peluang untuk mendapatkan momongan pun akan meningkat.

Ikan ini juga mengandung zinc dan omega-3 yang dapat mendukung pertumbuhan sel dan perkembangan otak, mata, dan sistem saraf janin. Dengan begitu, risiko terjadinya cacat lahir pada bayi pun dapat dikurangi. (nei.ist/dya)



# Penelitian Coba Buktikan Alien Hidup Tanpa Planet

**PENELITI** dari Skotlandia dan Amerika Serikat membuktikan bahwa alien bisa hidup tanpa menghuni planet terlebih dahulu. Planet kerap jadi acuan bagi peneliti lantaran berpotensi memiliki air sebagai unsur pendukung kehidupan.

Dalam studi baru yang diterbitkan dalam Jurnal *Astrobiology*, para peneliti menunjukkan bahwa mereka bisa hidup di ekosistem yang dapat menghasilkan dan mempertahankan kondisi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka sendiri tanpa perlu menghuni planet.

Riset itu dituangkan dalam makalah ilmiah berjudul 'Self-Sustaining Living Habitats in Extraterrestrial Environments.' Penulisnya adalah Robin Wordsworth, Profesor Ilmu Bumi dan Planet di Harvard, dan Charles Cockell, Profesor Astrobiologi di Sekolah Fisika dan Astronomi di Universitas Edinburgh.

"Definisi standar layak huni mengasumsikan bahwa kehidupan memerlukan keberadaan sumur gravitasi planet untuk menstabilkan air cair dan mengatur suhu permukaan," tulis para peneliti.

Wordsworth dan Cockell menulis bahwa penghalang dan struktur yang dihasilkan secara biologis dalam satu lokasi (mirip atmosfer dan daratan di Bumi) harus meniru kondisi planet yang memungkinkan kehidupan tanpa planet. Lokasi ini yang penting bisa membiarkan cahaya masuk untuk fotosintesis sambil menghalangi sinar UV.

Lokasi non-planet ini juga harus bisa mempertahankan kisaran suhu dan tekanan yang diperlukan agar air tetap dalam keadaan cair.

"Penghalang yang dihasilkan secara biologis yang mampu mentransmisikan radiasi tampak, menghalangi ultraviolet, dan

mempertahankan gradien suhu 25-100 K dan perbedaan tekanan 10 kPa terhadap ruang hampa dapat memungkinkan kondisi layak huni antara 1 dan 5 unit astronomi di Tata Surya," tulis mereka, dilansir Science Alert.

Lokasi yang mereka maksud memiliki ciri yang identik pada objek luar angkasa seperti bulan-bulan beku. Objek itu umumnya punya lautan yang hangat dan asin. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka memiliki siklus nutrisi?

Objek bermassa rendah di tata surya, bagian luarnya biasanya memiliki luas permukaan yang cukup

untuk menunjang kehidupan, namun konsekuensinya adalah energi Matahari yang sampai, lemah. Objek tersebut harus mampu mempertahankan atmosfernya, sehingga skenario tekanan dan suhu yang tepat untuk air mencair, dapat terjadi. Objek juga harus terlindung dari radiasi UV dan sinar kosmik.

Energi yang masuk dan energi yang keluar di objek non planet perlu mencapai titik keseimbangan. Beberapa organisme di Bumi telah berevolusi untuk menjaga keseimbangan ini.

"Ekosistem dengan siklus tertutup sepenuhnya di luar angkasa akan

memerlukan beberapa mekanisme internal untuk membentuk gradien kimia dan biota spesialis yang mampu mengurai limbah alami yang sulit terurai," tulis mereka.

Para penulis juga membahas faktor-faktor lain seperti ukuran sel dan faktor-faktor yang membatasi ukuran organisme uniseluler serta organisme yang lebih besar dan lebih kompleks.

"Sistem yang sepenuhnya otonom (harus) mampu melakukan regenerasi (asalkan) pertumbuhannya tidak terhalang kendala fisik atau kimia apa pun dan oleh karena itu menarik untuk dipertimbangkan lebih jauh," tulis mereka.

Kita cenderung berpikir bahwa jika kehidupan ada di tempat lain, ia mengikuti jalur evolusi yang sama seperti di Bumi, itu mungkin saja kurang tepat.

"Evolusi kehidupan di tempat lain mungkin mengikuti jalur yang sangat berbeda dari Bumi, habitat hidup juga dapat ada di luar lingkungan layak huni tradisional di sekitar bintang lain, di mana mereka akan memiliki tanda-tanda biologis yang tidak biasa tetapi berpotensi terdeteksi," tulis para penulis.

Para penulis bertanya, "Bisakah jenis struktur biologis yang kita bahas di sini berevolusi secara alami, tanpa campur tangan manusia?" Mereka berpendapat bahwa kehidupan non-indrawi dapat mempertahankan semua kondisi yang diperlukan untuk bertahan hidup di lingkungan luar angkasa.

"Kehidupan di Bumi belum melakukan hal ini, meskipun kehidupan di Bumi bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan yang semakin beragam dari waktu ke waktu," simpul mereka. (nei,ist/dya)



# Sejarah Hari Ibu dalam Teater di Galeri Indonesia Kaya

**SETIAP** tahunnya, tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Namun Hari Ibu Nasional bukan sekadar perayaan bagi para ibu di Indonesia. Hari Ibu ternyata merupakan hari peringatan pergerakan perempuan Indonesia, didasari oleh Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung pada 1928 silam.

Sebagai salah satu cara untuk memperluas pemahaman sejarah ini, Keana Films dan Galeri Indonesia Kaya berkolaborasi dan menghadirkan pentas teater monolog bertajuk *Karena Aku Perempuan: Kelahiran Sebuah Pergerakan*. Teater dengan durasi selama 17–20 menit ini merupakan bagian dari acara *Panggung Gagasan: Perempuan Indonesia - Peringatan Kongres Perempuan Indonesia Pertama 1928*.

Teater monolog ini menjadi panggung bagi tiga aktris ternama Tanah Air, yakni Marcella Zalianty, Ruth Marini, dan Aghniny Haque, untuk merekonstruksi berjalannya Kongres Perempuan Indonesia pertama.

Hampir satu abad lalu, para perempuan dari berbagai organisasi pergerakan Indonesia berkumpul bersama untuk memperjuangkan hak

dan memperkuat pemberdayaan perempuan. Kongres ini diselenggarakan di Yogyakarta pada 22–25 Desember 1928.

“Bersama Galeri Indonesia Kaya, kami ingin membuat sesuatu di sini dan Hari Ibu sepertinya menjadi momen yang tepat dan ada peristiwa penting tentang Kongres Perempuan pertama di Indonesia.

Kok, banyak yang tidak tahu bahwa Hari Ibu ini asal muasalnya dari Kongres Perempuan? Makna di balik itu perjuangan dilakukan sampai kita ini para perempuan bisa bersama-sama berdiri di sini, itu semuanya awalnya karena peristiwa bersejarah itu,” ucap Marcella Zalianty, pemeran tokoh Nyonya Sukonto, di jumpa pers teater pada Kamis (19/12/2024).

Menurut Marcella, lewat acara dan teater ini, mereka ingin mengangkat peran perempuan dalam pembangunan bangsa, dengan menyoroti kontribusi perempuan sebagai pilar bangsa.

“Kita seraya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya kesetaraan gender. Jadi kita bersama juga ke depannya berharap bahwa lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia,” imbuhnya.

Selain pertunjukan teater monolog, acara *Panggung Gagasan* ini menghadirkan sesi

wicara yang membahas soal isu-isu perempuan. Gelar wicara bertajuk *Perempuan Indonesia: Kini dan Nanti* ini mengundang enam tokoh perempuan sebagai pembicara.

Mereka adalah Niniek L. Karim, aktris dan psikolog senior; Nita Yudi, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI); Andini Weningtyas Effendi, jurnalis dan aktivis lingkungan; Nurul Arifin, politisi dan aktris; Triana Wulandari, praktisi sosial; serta Davina Veronica, aktivis lingkungan dan model.

Sekilas soal pentas teater “*Karena Aku Perempuan*”

Teater yang terbagi ke dalam dua babak ini merupakan karya Wawan Sofwan sebagai sutradara, Marcella Zalianty sebagai produser, dan Kadek Sonia Piscayanti sebagai penulis naskah.

Pertunjukan ini akan menghadirkan tiga karakter perempuan penting dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Salah satunya adalah Nyonya Sukonto, yang diperankan oleh Marcella Zalianty.

Sukonto, perwakilan dari organisasi perempuan Wanita Oetomo, merupakan ketua komite Kongres Perempuan Indonesia. Kemudian, ada

juga tokoh Nyi Hajar Dewantara yang diperankan oleh Ruth Marini. Nyi Hajar Dewantara merupakan aktivis perempuan dan penggiat pendidikan Indonesia, yang juga merupakan istri dari pahlawan nasional Ki Hajar Dewantara. Lalu, Aghniny Haque berperan sebagai Soejatin, seorang guru muda dan Poetri Indonesia Cabang Yogyakarta.

Selama 20 menit, para pemeran akan menghadirkan rekonstruksi dari Kongres Perempuan Indonesia, termasuk argumentasi dan perdebatan antara para peserta kongres. Musik dari pementasan ini diaransemen oleh Achi Hardjakusumah, diangkat dari salah satu karya komposer ternama Indonesia, Ismail Marzuki.

“Yang menjadi intisari dari musiknya adalah karangan Ismail Marzuki yang berjudul *Wanita*, lagu itu menjadi bingkai utamanya yang kemudian akan saya sesuaikan sesuai dengan adegan tertentu dalam pementasan ini,” jelas Achi.

Sutradara pementasan, Wawan Sofwan, mengatakan bahwa teater ini menjadi salah satu cara baru untuk memperkenalkan sejarah kepada masyarakat. Jika di sekolah sejarah diajarkan secara satu arah, lewat teater, pengajaran berbentuk dua arah. (nei,ist/dya)



## Saling Tuding ... (dari Hal 1)

**ANGGOTA** Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto mengatakan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen merupakan usulan dari PDI Perjuangan (PDIP).

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI, Wihadi Wiyanto mengatakan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen merupakan usulan dari PDI Perjuangan (PDIP).

Ia menyebut wacana itu adalah keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi produk DPR periode 2019-2024 atas inisiasi PDIP.

"Kenaikan PPN 12 persen itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan," kata Wihadi dalam keterangannya, Minggu (22/12/2024).

Wihadi pun menyatakan sikap PDIP mengenai kenaikan PPN saat ini sangat bertolak belakang dengan saat membentuk UU HPP dulu. Padahal, panja pembahasan kenaikan PPN dipimpin oleh PDIP.

"Jadi kita bisa melihat dari yang memimpin panja pun dari PDIP, kemudian kalau sekarang pihak PDIP sekarang meminta ditunda ini adalah merupakan sesuatu hal yang menyudutkan pemerintah (Presiden) Prabowo," kata Wihadi.

Wihadi lantas menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah mencermati kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya upayanya yakni menerapkan kenaikan PPN terhadap barang-barang mewah.

"Sehingga pemikiran Pak Prabowo ini bahwa kalangan menengah bawah itu tetap terjaga daya belinya dan tidak menimbulkan gejolak ekonomi, ini adalah merupakan langkah bijaksana dari Pak Prabowo," ujar dia.

Wihadi mengingatkan agar pihak-pihak tertentu tidak menggiring isu bahwa kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan pemerintahan Prabowo.

"Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan," ucapnya.

"Jadi kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12% adalah membuang muka jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP," lanjut dia.

Waketum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR,

Rahayu Saraswati, juga telah buka suara mengenai masalah kenaikan PPN 12 persen.

Saras mengaku heran dengan PDIP yang kini menolak rencana PPN 12 persen padahal partai itu dahulu merupakan ketua panja pembuatan UU HPP.

"Itulah kenapa saya heran saat ada kader PDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa," ujar Sara

"Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" tuturnya.

### PDIP Sebut Bisa Diubah Pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan Waketum Partai Gerindra Rahayu Saraswati yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN 12%. Dolfie mengatakan mulanya UU HPP merupakan inisiatif pemerintah Presiden RI ke-7 Joko Widodo

(Jokowi).

"UU HPP merupakan UU inisiatif Pemerintahan Jokowi, yang disampaikan ke DPR tanggal 5 Mei 2021. Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP," kata Dolfie sekaligus Ketua Panja RUU tersebut kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

Dolfie menyebutkan saat itu sebanyak 8 fraksi di DPR RI kecuali PKS menyetujui RUU HPP menjadi undang-undang. Ia mengatakan RUU itu diketok pada 7 Oktober 2021.

"Seluruh fraksi setuju untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP; Selanjutnya RUU HPP dibahas bersama antara Pemerintah dan DPR RI (Komisi XI); disahkan dalam Paripurna tanggal 7 Oktober 2021; 8 Fraksi (Fraksi PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, NasDem, Fraksi PKB, F Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP) menyetujui UU HPP kecuali fraksi PKS," kata Dolfie.

"UU HPP, bentuknya adalah Omnibus Law, mengubah beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPH, UU PPN, dan UU Cukai. UU ini juga mengatur Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon," tambahnya.

Ia mengatakan pemerintah dapat mengusulkan kenaikan atau penurunan dari tarif PPN tersebut.

Adapun rentang perubahan tarif itu berada di angka 5-12 persen.

"Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12% (sebelumnya adalah 11%). Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5% sampai dengan 15% (bisa menurunkan maupun menaikkan); Sesuai UU HPP, Pasal 7 ayat (3), Pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan Persetujuan DPR," katanya.

Dolfie menyebutkan pertimbangan kenaikan atau penurunan tarif PPN bergantung pada kondisi perekonomian nasional. Ia mengatakan pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun).

Adapun Dolfie memberikan masukan kepada pemerintah Prabowo Subianto jika tetap menaikkan PPN sebesar 12%. Ia mengatakan kenaikan itu mesti dibarengi dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat.

"Apabila Pemerintahan Presiden Prabowo tetap menggunakan tarif PPN 12%, maka hal-hal yang harus menjadi perhatian adalah; kinerja ekonomi nasional yang semakin membaik, pertumbuhan ekonomi berkualitas, penciptaan lapangan kerja, penghasilan masyarakat meningkat, pelayanan publik yang semakin baik," tambahnya. (wid, din, ant, rls, ist/dya)

## Menko Airlangga Akui Bisa Picu Inflasi

**MENTERI** Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal 2025 bisa memicu inflasi. Hal itu diungkapkan Airlangga saat ditemui di Alfamart Drive Thru Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten, Minggu (22/12/2024).

"Jadi tentu dari segi kenaikan ini [PPN menjadi 12%] pengaruh inflasi ada. Akan tetapi, relatif tidak terlalu tinggi," kata Airlangga.

Airlangga menyebut kenaikan inflasi akan didorong oleh sektor transportasi. Namun, perlu diketahui, jasa angkutan umum darat dan air diberikan fasilitas pembebasan PPN. "Dorongan ke transportasi karena transportasi tidak ada PPN-nya. Tentunya yang mendorong inflasi adalah transportasi," ujarnya.

Sama halnya dengan barang kebutuhan pokok yaitu beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran yang juga dikenakan PPN dengan tarif 0%.

Airlangga mengaku optimistis daya beli masyarakat akan tumbuh di tengah PPN 12% yang bakal mulai berlaku pada awal Januari 2025. Terlebih, pemerintah juga mengeluarkan berbagai paket stimulus. "Antara lain bayar listrik

50% untuk Januari sampai Februari [2025]. Kemudian untuk pembelian perumahan PPN ditanggung pemerintah sampai dengan Rp2 miliar. Dan sampai pembelian Rp5 miliar dipotong Rp2 miliar. Nah itu kan membuktikan pemerintah memperhatikan apa yang dibeli oleh kelas menengah," ungkapnya.

Selain itu, Airlangga menambahkan pemerintah juga memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) KBLBB atau Electric Vehicle (EV) atas penyerahan EV roda empat tertentu dan bus tertentu. Selanjutnya, PPnBM DTP KBLBB/EV atas impor EV roda empat tertentu secara utuh (Completely Built Up/CBU) dan penyerahan EV roda empat tertentu yang berasal dari produksi dalam negeri (Completely Knock Down/CKD), serta Pembebasan Bea Masuk EV CBU.

"Terutama elektrik karena kami mau agar Jakarta ataupun Indonesia emisi karbonnya dikurangi. Demikian pula untuk mobil listrik dilanjutkan, bahkan ditambahkan kendaraan hybrid dikasih potongan 3%," terangnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menyatakan pengaruh kenaikan PPN 12 persen terhadap harga barang dan jasa hanya sebesar 0,9 persen.

"Kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti.

Sebagai ilustrasi, untuk minuman bersoda dengan harga jual Rp7.000, nilai pengenaan PPN dengan tarif 11 persen adalah sebesar Rp770. Maka, jumlah yang harus dibayar sebesar Rp7.770.

Sementara, ketika PPN menjadi 12 persen, pengenaan PPN sebesar Rp840, sehingga total biaya yang harus dibayar sebesar Rp7.840.

Dari contoh itu, selisih kenaikan harga antara PPN dengan tarif 11 persen dan 12 persen sebesar Rp70 atau hanya 0,9 persen dari harga sebelum kenaikan Rp7.770.

Sama halnya untuk barang lain, televisi misalnya. Dengan harga jual senilai Rp5 juta, PPN yang dibebankan dengan tarif 11 persen adalah Rp550 ribu, sementara dengan tarif 12 persen menjadi Rp600 ribu.

Total harga yang harus dibayar konsumen naik dari Rp5,55 juta menjadi Rp5,6 juta atau berselisih 0,9 persen.

"Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa," ujar Dwi. (wid, ist, rls, ant/dya)



SEGENAP PIMPINAN DAN STAF DPRD KOTA  
SURABAYA MENGUCAPKAN

Selamat Hari  
**NATAL 2024**

25 DESEMBER 2024



**Adi Sutarwijono**

Ketua DPRD Kota Surabaya

**Bahtiar Rifai**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Laila Mufidah**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya

**Arif Fathoni**

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya